



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P. 10 /Menhut-II/2011
TENTANG
6 (ENAM) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM
PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 70/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 telah ditetapkan 8 (delapan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Hutan mendukung Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II, diperlukan 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota;
 - c. bahwa dengan pertimbangan berbagai sektor yang ada, diambil 6 (enam) kebijakan sebagai prioritas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kehutanan sebagai program lanjutan meneruskan 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan yang telah dijalankan Tahun 2005 - 2009;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 6 (ENAM) KEBIJAKAN PRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II.

Pasal 1

Menetapkan 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II untuk dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Instansi Kehutanan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Pasal 2

6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

1. Pemantapan Kawasan Hutan.
2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.
4. Konservasi Keanekaragaman Hayati.
5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.
6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.

Pasal 3

Pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian Kehutanan wajib menyusun petunjuk pelaksanaan 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

Seluruh aparat Instansi Kehutanan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah wajib melaksanakan 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 70/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang 8 (delapan) Kebijakan Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR

Januari 2011

NOTA DINAS

ND.

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Lampiran : -
Perihal : Kebijakan Prioritas Kementerian Kehutanan Tahun 2010 - 2014

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor ND. 10/Ren – 1/2011 tanggal 13 Januari 2011, perihal seperti tersebut pada pokok nota dinas di atas, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 70/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 telah ditetapkan 8 (delapan) Kebijakan Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II.
2. Sementara itu dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010 – 2014 terdapat 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Kementerian Kehutanan.
3. Dalam rangka harmonisasi kedua peraturan tersebut , diperlukan perubahan terhadap peraturan Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Konsep Nota Dinas Bapak Sekretaris Jenderal kepada Bapak Menteri Kehutanan berikut konsep Peraturan Menteri Kehutanan tentang 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II.

Apabila tidak ada petunjuk lain mohon perkenan Bapak untuk menandatangani konsep Nota Dinas serta membubuhkan paraf pada konsep Peraturan Menteri Kehutanan dimaksud. Demikian kami sampaikan dan mohon arahan Bapak lebih lanjut.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

KRISNA RYA
NIP 19590730 199003 1 001

Januari 2011

NOTA DINAS

ND.

Kepada Yth. : Menteri Kehutanan
Dari : Sekretaris Jenderal
Lampiran : -
Perihal : Kebijakan Prioritas Kementerian Kehutanan Tahun 2010 - 2014

Berkenaan dengan Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II, kami sampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 70/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 telah ditetapkan 8 (delapan) Kebijakan Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II.
2. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010 – 2014, Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II hanya meliputi 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Kementerian Kehutanan, dimana 2 program prioritas yaitu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan Kehutanan dihilangkan karena sudah termasuk dalam pengertian 6 kebijakan prioritas tersebut.
3. Dalam rangka harmonisasi program Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Kementerian Kehutanan, diperlukan perubahan terhadap peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 70/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009, maka terlampir Konsep Peraturan Menteri Kehutanan tentang 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II.

Demikian kami sampaikan dan mohon arahan Bapak Menteri lebih lanjut.

Sekretaris Jenderal,

Hadi Daryanto
NIP 19571020 198203 1 002